SURAT PERNYATAAN

Nomor: [Nomor Surat]

Perihal: Ketentuan Penerbitan Faktur Pajak

Kepada Yth., [Nama Vendor] [Alamat Vendor] [Email Vendor]

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kerja sama antara **PT Mitra Distribusi Utama** dan **[Nama Vendor]** dalam pendistribusian produk Pulsa, Paket Data, serta Non-Pulsa (Uang Elektronik, Token PLN, dan PPOB), kami mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021** mengenai penghitungan dan pemungutan **PPN dan PPh** atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta kelancaran administrasi, **[Nama Vendor]** wajib memenuhi ketentuan berikut dalam penerbitan **Faktur Pajak**:

1. Penerbitan dan Ketepatan Faktur Pajak

- Vendor wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan hasil rekonsiliasi transaksi yang telah disepakati dengan PT Mitra Distribusi Utama.
- Faktur Pajak harus mencerminkan nilai transaksi yang telah diverifikasi oleh kedua belah pihak.

2. Batas Waktu Penerimaan Faktur Pajak

Faktur Pajak harus diterima oleh PT Mitra Distribusi Utama paling lambat tanggal
 15 bulan berikutnya untuk transaksi yang terjadi pada bulan sebelumnya.

3. Kesesuaian Tanggal Faktur Pajak

• Tanggal Faktur Pajak harus **sesuai dengan periode transaksi**, bukan berdasarkan tanggal penerbitan Faktur Pajak.

4. Persyaratan Dokumen Pendukung

• Faktur Pajak harus disertai dengan **Invoice yang telah ditandatangani dan dibubuhi materai**, sebagai bukti transaksi yang sah.

5. Konsekuensi Keterlambatan Penerbitan Faktur Pajak

- Jika vendor terlambat menerbitkan Faktur Pajak, maka vendor wajib memberikan pinjaman saldo deposit sebesar PPN yang terutang kepada PT Mitra Distribusi Utama.
- Saldo deposit ini akan dilunasi oleh PT Mitra Distribusi Utama setelah Faktur Pajak diterima dengan lengkap dan sesuai ketentuan.

6. Pengiriman Dokumen

- Faktur Pajak dan Invoice harus dikirimkan melalui email ke alamat berikut:
 - o tax@jempolkios.com
 - o dewi@jempolkios.com
 - o fety@jempolkios.com

7. Perubahan Kebijakan

- Jika terdapat perubahan kebijakan terkait produk dan transaksi atas Faktur Pajak, vendor wajib melakukan konfirmasi tertulis paling lambat 1 bulan sebelum perubahan berlaku.
- Perubahan kebijakan hanya dapat diberlakukan setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Demikian **Surat Pernyataan** ini kami sampaikan. Kami mengharapkan kerja sama yang baik dari **[Nama Vendor]** untuk mematuhi ketentuan ini guna memastikan kelancaran proses administrasi perpajakan dan transaksi bisnis.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
[Nama Vendor]
[Nama dan Jabatan Pihak Berwenang]

[Tanda Tangan & Stempel Perusahaan]